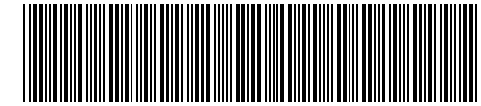




**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : SP DIPA- 005.04.2.402651/2018**



DS:9201-0130-3650-0908

Revisi ke 03

Tanggal : 01 Oktober 2018

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No. 15 Tahun 2017 tentang APBN TA 2018.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- | | | |
|-------------------------------|------------|---|
| 1. Kementerian Negara/Lembaga | : (005) | MAHKAMAH AGUNG |
| 2. Unit Organisasi | : (04) | DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA |
| 3. Provinsi | : (13) | KALIMANTAN BARAT |
| 4. Kode>Nama Satker | : (402651) | PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK |
| Sebesar | : Rp. | 54.320.000 (LIMA PULUH EMPAT JUTA TIGA RATUS DUA PULUH RIBU RUPIAH) |

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.04.08 Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama
005.04.08.1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

	Jumlah Uang
Rp.	54.320.000
Rp.	54.320.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	54.320.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNB			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
			5. Hibah Langsung	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- | | | |
|-------------------|-----------|------------|
| 1. KPPN PONTIANAK | (042) Rp. | 54.320.000 |
|-------------------|-----------|------------|

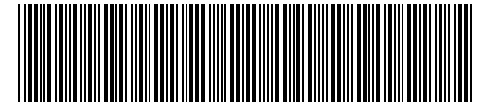
E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2018 sampai dengan 31 Desember 2018.

Jakarta, 05 Desember 2017
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ASKOLANI
NIP. 196606111992021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402651/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9201-0130-3650-0908

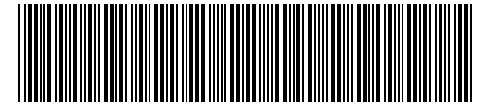
Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (402651) PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Kuasa Pengguna Anggaran : Naffi, S.Ag, MH
Bendahara Pengeluaran : Alvino Dwi Rachman Prabowo, S.Kom
Pejabat Penanda Tangan SPM : Jumadi, S.HI

Halaman : IA.1

1 Fungsi	03	KETERTIBAN DAN KEAMANAN		54.320.000
Sub Fungsi	03.04	PERADILAN		54.320.000
2 Program	005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		54.320.000
Sasaran Program	01	Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, Transparan dan Akuntabel diLingkungan Peradilan Agama		
Indikator Kinerja Program	01	Penyelesaian Administrasi Perkara yang Sederhana, Transparan dan Akuntabel	290340 perkara	
	02	Pelayanan Peradilan Agama	388 satker	
	03	Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama	350 orang	
	04	Tata Laksana Perkara Kasasi dan PK serta Kesyar'ahan	1 naskah	
Output Program	01	Putusan perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding tepat waktu pada Peradilan Agama		
Indikator Output Program	01	Perkara perdata yang diselesaikan	290340 perkara	
	02	Perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara	9650 perkara	
	03	Perkara yang diselesaikan melalui sidang diluar gedung pengadilan	30876 perkara	
	04	Jam Layanan Pos Bantuan Hukum	115000 jam layanan	
	05	Perkara Jinayah Peradilan Agama yang diselesaikan tepat waktu	320 perkara	
Kegiatan	1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama		54.320.000
Sasaran Kegiatan	01	Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	02	Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan		
	03	Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama		
	04	Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan		
	05	Layanan Dukungan Manajemen Perkara		
Indikator Kinerja Kegiatan	01	Jumlah Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara		
	01	Jumlah Perkara Peradilan Agama yang Diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan		
	01	Jumlah Jam Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama		
	01	Jumlah Administrasi Perkara Jinayah di Lingkungan Peradilan Agama yang Diselesaikan		
	01	Layanan Dukungan Manajemen Perkara		
Output Kegiatan	1053.002	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	2,00 LAYANAN	54.320.000
Indikator Output Kegiatan	01	Pedoman Tata Kelola dilingkungan Peradilan Agama yang Disusun	2 pedoman	

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402651/2018
IA. INFORMASI KINERJA**



DS:9201-0130-3650-0908

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (402651) PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Kuasa Pengguna Anggaran : Naffi, S.Ag, MH
Bendahara Pengeluaran : Alvino Dwi Rachman Prabowo, S.Kom
Pejabat Penanda Tangan SPM : Jumadi, S.HI

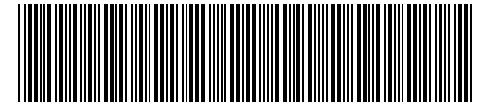
Halaman : IA.2

Indikator Output Kegiatan	02	Pengadilan Agama yang meningkat dalam pelayanan Publik	359 satker
	03	Tenaga teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan	120 orang

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP 195807141984031005

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402651/2018
II. RINCIAN PENGELUARAN**



DS:9201-0130-3650-0908

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (402651) PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK
Kewenangan : (KD)

Halaman : II. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH 8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402651	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK	-	54.320	-	-	-	54.320	13.51	
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	54.320	-	-	-	54.320		
1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	-	54.320	-	-	-	54.320		
1053.002	Layanan Dukungan Penyelesaian Perkara	-	54.320	-	-	-	54.320		
01	RM	-	54.320	-	-	-	54.320	042	
JUMLAH		-	54.320	-	-	-	54.320		

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP 195807141984031005

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402651/2018
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:9201-0130-3650-0908

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (04) DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi : (13) KALIMANTAN BARAT
Kode>Nama Satker : (402651) PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	402651	PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK														
		RENCANA PENARIKAN DANA	0	0	300	300	300	300	300	300	50.995	300	300	300	925	54.320
		52 BELANJA BARANG	0	0	300	300	300	300	300	300	50.995	300	300	300	925	54.320
	005.04.08.1053	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	0	0	300	300	300	300	300	300	50.995	300	300	300	925	54.320
		52 BELANJA BARANG	0	0	300	300	300	300	300	300	50.995	300	300	300	925	54.320
		PERKIRAAN PENERIMAAN	15	10	10	5	10	5	15	15	15	15	15	15	10	140
		- PNB (425239)	15	10	10	5	10	5	15	15	15	15	15	15	10	140

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP 195807141984031005

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402651/2018
IV A. B L O K I R**



DS:9201-0130-3650-0908

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [402651] PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

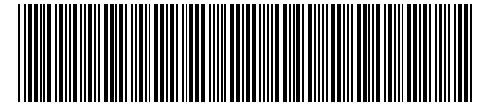
Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP 195807141984031005

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2018
NOMOR : DIPA- 005.04.2.402651/2018
IV B. C A T A T A N**



DS:9201-0130-3650-0908

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [04] DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
Provinsi : [13] KALIMANTAN BARAT
Kode dan Nama Satker : [402651] PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 05 Desember 2017
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

ttd.
Drs. H. Abd. Manaf, M.H.
NIP 195807141984031005